

LAPORAN DIVISI HUKUM

DATA DAN INFORMASI



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**DIVISI HUKUM DATA DAN INFORMASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir Dividi Hukum Data dan Informasi (H2DI) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020.

Sholawat salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW pemimpin revolusi dunia yang telah menunjukkan kita semua menuju jalan yang diridloi oleh Allah SWT sehingga kita dapat membedakan sesuatu yang baik yang boleh kita lakukan dan hal-hal yang buruk yang harus kita tinggalkan.

BAWASLU Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berfokus pada

pengawasan, pencegahan dan penindakan atas terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Berkat kerjasama internal Kelembagaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan kerjasama eksternal dengan Komisi Pemilihan Umum, PPK, PPS, KPPS, Partai Politik, Tim Sukses, jajaran Kepolisian, Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Tokoh Agama dan semua *Stakeholders*, sehingga telah membawa perubahan mutu Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik dan berkualitas.

BAWASLU Kabupaten Sidoarjo mengutamakan tindakan preventif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan melakukan sosialisasi secara massif dengan harapan terselenggaranya pemilihan yang demokratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Laporan akhir ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan proyeksi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang. Sehingga pelaksanaannya lebih berkualitas dan berintegritas. Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bimbingan dari Kordinator divisi H2DI Provinsi Jawa Timur dan bantuan dari jajaran BAWASLU Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, maka kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam penyelesaian laporan akhir ini.

Kami menyadari bahwa Laporan akhir divisi H2DI ini masih jauh dari sempurna yang mungkin terdapat berbagai kelemahan baik dari kerangka sistematika penyusunan maupun substansi isi laporan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita

semua dan semoga kita selalu mendapatkan maghfiroh dari-Nya. Amiin.

Demikian semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal ilmu bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr. wb.

FERI KUSWANTO, S.Pdi., M.Pdi.

Koordiv H2DI BAWASLU Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
I. Gambaran Umum.....	7
II. Tujuan	9
III. Dasar Hukum	10
BAB II 12	
ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM.....	12
BAB III	16
PENYIAPAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM.....	16
I. Penyiapan Analisis	16
II. Konsultasi Kajian Hukum	20
BAB IV	26
PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI	
PRODUK HUKUM	26
I. Pendokumentasian Produk Hukum	26

II. Sosialisasi Produk Hukum.....	32
BAB V 38	
KOORDINASI INTERNAL DAN KOORDINASI DENGAN BAWASLU.....	38
I. Koordinasi Internal, Koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia dan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	38
BAB VI.....	44
SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM DAN DATA INFORMASI	44
I. Sosialisasi	44
II. Peningkatan Kapasitas Di Bidang Hukum dan Data Informasi	48
BAB VII.....	58
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	58
BAB VIII.....	59
PENUTUP	59
I. Kesimpulan	59
II. Saran	61

DAFTAR TABEL ...

Tabel 1: Permasalahan Hukum

Tabel 2 : Data Dokumen Hukum Dan Unggah Jdih

Tabel 3 :Data Pemantauan Putusan

Tabel 4: Data Peningkatan Kapasitas

Tabel 5 : Data Sosialisasi

Tabel 6: Data Rapat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pemaparan materi oleh Koordiv H2DI

Gambar 2: Kegiatan Reses H. Rahmat Muhajirin, S.H. di kantor Bawaslu Sidoarjo

Gambar 3: Kegiatan Bimbingan Teknis PKD di Fave Hotel

Gambar 4: Kegiatan Pelantikan dan Bimtek PKD

BAB I PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat adhoc (sementara) dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu. Masalah-masalah yang terjadi

tentunya tidak lepas begitu saja, ada penindakan disetiap perbuatan yang dianggap terdapatnya dugaan pelanggaran pemilihan umum. Berbagai aturan- aturan regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari UU Pemilu hingga peraturan KPU maupun Bawaslu. Masyarakat dapat menjumpai Informasi tersebut di masing-masing pojok pengawasan kantor Bawaslu.

Informasi Hukum terkait pengawasn yang dilakukan selama proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Kegiatan Bawaslu Pada Tahun 2021, baik didalamnya perihal sosialisasi hukum, kajian hukum serta bantuan hukum hingga adanya Sengketa Hasil Pemilu atau yang sering disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya

hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

II. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan akhir ini antara lain sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo baik kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta pertanggungjawaban kepada Masyarakat selama proses tahapan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Selain itu juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengawas Pemilihan Umum agar kedepan dapat menjalankan tugas secara ideal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang lebih berkualitas

dan berintegritas;

III. Dasar Hukum

Dalam melakukan penyusunan laporan akhir Hukum Data dan Informasi pengacu Pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

BAB II

ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM

Bantuan hukum diberikan kepada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau badan ad-hoc dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinir agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor : 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi tidak dapat memberikan bantuan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dari awal proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tidak terdapat hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.
Data Permasalahan Hukum yang dihadapi sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021

Tahun	Jenis	Tuntutan	Putusan	Keterangan
	(Etik / Perdata/ Pidana/ TUN/MK/		kabul sebagian /tolak/ Tidak dapat	
2020	HUKUM LAIN			Rekomendasi KASN
2020			Tidak Dapat Diterima	Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye

2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	ADM			Rekomendasi Untuk Penurunan Alat Peraga Kampanye
2020	HUKUM LAIN			Rekomendasi Ke Instansi Yang Bersangkutan
2020	KODE ETIK			Peringatan Tertulis

BAB III

PENYIAPAN ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM

I. Penyiapan Analisis

Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman tingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungan antar sesamanya serta untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga norma hukum yang ada perlu selalu dikaji dan ditelaah termasuk didalamnya kajian atas aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara serentak.

Sebagaimana yang dikutip dari "*Restatement kumpulan kajian hukum pemilu*" yang menyatakan bahwa untuk menghadapi kompleksitas

penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, maka Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat membangun pemahaman yang seragam bagi jajarannya sampai dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisir perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan.

Sepanjang tahun 2020 - 2021 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo telah melakukan analisis dan kajian hukum perihal peraturan baik Undang-Undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.
2. PKPU Nomor : 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
3. PKPU Nomor : 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
4. PKPU Nomor : 18 tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
5. PKPU Nomor : 1 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota.

6. PKPU Nomor : 5 tahun 2020 perubahan ketiga atas PKPU 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
7. PKPU Nomor : 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (covid 19).
8. Perbawaslu Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Perbawaslu Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

10. Serta membahas pemberian data informasi yang dikecualikan dalam melakukan penanganan pelanggaran.

II. Konsultasi Kajian Hukum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 merupakan wujud demokrasi dimana rakyat dapat berpartisipasi secara langsung untuk memilih pimpinannya disuatu wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun.

Dalam pemilihan tersebut rakyat diberi kesempatan dan jaminan kenbebasan oleh Undang-

Undang untuk memilih pimpinan yang adil, jujur dan berkualitas. Sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraan pemilihan harus berkepastian hukum sehingga hak politik rakyat dapat digunakan dengan semestinya.

Untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memberikan ruang yang sama kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, partai politik pengusung pasangan Calon dan semua masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dilapangan selama tahapan berjalan. Terhadap laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan analisis dan kajian hukum agar dapat mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berikut kami sajikan data terkait analisis dan kajian hukum sepanjang pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020.

Tabel 2.
Data Analisis dan Kajian Hukum sepanjang tahun 2020 s/d 2021

Tahun	Judul Analisis	Keterangan
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran hukum lain (pidana) nomor register 01/TM/PB/Kab/16.33/I/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran nomor register (bukan pelanggaran) 02/REG/TM/PB/KEC.TGA/16.33/XI/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.BLD/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.BDR/16.33/X/2020	

2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.CND/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.GDG/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.JBN/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.KRB/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.KRN/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.PRG/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.PRB/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.SDT/16.33/X/2020	

2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.SDA/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.SKD/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TMN/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TGA/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TRK/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.TLG/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.WRU/16.33/X/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran administrasi dengan nomor register 01/TM/PB/KEC.WNY/16.33/X/2020	

2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran pidana nomor register 02/TM/PB/KAB.SDA/16.33/XI/2020	
2020	Kajian hukum pada proses penanganan pelanggaran kode etik nomor register 01/LP/PB/KAB.SDA/16.33/XI/2020	

BAB IV

PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI

PRODUK HUKUM

I. Pendokumentasian Produk Hukum

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dalam mensosialisasikan produk hukum, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggunakan cara sebagai berikut :

- a) Mengunggah produk hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;
- b) Mengunggah produk hukum dan kinerja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Ke website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c) Menggelar kegiatan tatap muka berupa sosialisasi, bimbingan teknis.

Berikut produk hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

yang telah diunggah ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu :

Tabel 3.
Data Dokumen Hukum Dan Unggah Jdih

No	Tahun	Jenis	Judul	Link JDIH
		(putusan/ monografi/ artikel/ buku penelitian/ pengkajian/ naskah akademis)		
1.	2021	MOU	Nomor. 018/PM.05/KJI2 4/12/ 2021 Perjanjian kerjasama dengan DEWAN PEMUDA Kab. Sidoarjo tentang Pendidikan politik hukum dan demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
2.	2021	MoU	Nomor. 017/PM.05/KJI2 4/ 06/2021 Perjanjian kerjasama dengan LP. Maarif Kab. Sidoarjo tentang Pendidikan politik hukum dan demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
3.	2021	MoU	Nomor. 016/PM.05/KJI2 4/ 05/2021 Perjanjian Kerjasama	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5

			Dengan Aliansi Bem Delta Sidoarjo Tentang Pendidikan Politik Hukum Dan Demokrasi	Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
4.	2019	Putusan	Nomor : 01/Ps.Reg/16.33/I/2019 Tahun 2019 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/1786194997/putusan-penyelesaian-sengketa-pemilu-komisi-pemilihan-umum-kpu-kabupaten-sidoarjo.html
5.	2018	Putusan	Nomor 05/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Atas Nama Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
6.	2018	Putusan	Nomor 04/Ps.Reg/16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

			Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	
7.	2018	Putusan	Nomor 03/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/Viii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
8.	2018	Putusan	Nomor 01/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
9.	2018	Putusan	Nomor :02/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemmilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

10.	2018	Putusan	Nomor 02/Lp/Adm/ Bwsl.Kab.16.33/ Vii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=si doarjo&page=1&per-page=5
11.	2018	Putusan	Nomor 01/Lp/Adm/ Bwsl.Kab.16.33/ Vii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peaturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=si doarjo&page=1&per-page=5

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan

publik sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Informasi Publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pwemilihan Umum Luar Negeri.

Perbawaslu No 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pwemilihan Umum Luar Negeri. Perbawaslu No 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip dilingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut beberapa Data yang diupload di PPID Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tabel 4.

Data Dokumen Hukum yang tersedia di PPID pada tahun 2020 - 2021

Tahun	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	Link	Keterangan
	(putusan, monografi, artikel, buku, penelitian, pengkajian, atau naskah akademis)			
2020	Buku	Laporang Akhir Humas Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Hukum, Data dan Informasi Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	
2020	Buku	Laporan Akhir Layanan Informasi Publik Tahun 2020	https://ppid.sidoarjo.bawaslu.go.id/informasi-kegiatan-dan-kinerja-bawaslu-sidoarjo/	

II. Sosialisasi Produk Hukum

Keberadaan Bawaslu menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dilakukan selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 baik oleh peserta pemilu/pemilihan maupun oleh penyelenggara sesuai tingkatannya dan badan ad-hoc di wilayahnya.

Agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengadakan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 baik kepada pasangan calon, partai politik pengusung pasangan calon, stakeholders maupun masyarakat umum melalui

organisasi kemasyarakatan, LSM dan awak media.

Adapun produk hukum yang disosialisakan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.

Data Sosialisasi Produk Hukum

No	Tahun	Jenis	Judul	Link JDIIH
		(putusan/monografi/ artikel/buku/ penelitian/ pengkajian/naskah akademis)		
1.	2019	Putusan	Nomor : 01/Ps.Reg/16.33 /I/2019 Tahun 2019 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1786194997/putusan-penyelesaian-sengketa-pemilu-komisi-pemilihan-

				umum-kpu-kabupaten-sidoarjo.html
2.	2018	Putusan	Nomor 05/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Atas Nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
3.	2018	Putusan	Nomor :04/Ps.Reg/ 16.33/IX/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
4.	2018	Putusan	Nomor : 03/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
5.	2018	Putusan	Nomor : 01/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

6.	2018	Putusan	Nomor :02/Ps/Bwsl.Sdr. 16.33/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilu Komisi Pemmilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
7.	2018	Putusan	Nomor : 02/Lp/Adm/Bwsl. Kab.16.33/Vii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
8.	2018	Putusan	Nomor :01/Lp/Adm/Bwsl. Kab.16.33/Vii/2018 Tahun 2018 Tentang Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ketua Dan Anggota Kpu Kabupaten Sidoarjo	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

BAB V

KOORDINASI INTERNAL DAN KOORDINASI DENGAN BAWASLU

I. Koordinasi Internal, Koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia dan Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 ditengah pandemi covid-19 menuntut Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk bekerja cermat dan cerdas agar amanat yang diberikan Undang-Undang tetap bisa dijalankan dengan tetap taat pada protol kesehatan demi pencegahan penyebaran Covid-19 dan keselamatan semua jajarannya.

Sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan

rapat koordinasi internal dengan jajaran ad-hoc ditingkat kecamatan baik yang dilakukan secara luring (sebelum penerapan protokol kesehatan) maupun secara daring (pada saat penerapan protokol kesehatan).

Selain rapat koordinasi internal dengan jajaran ad-hoc ditingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo juga aktif menghadiri undangan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring. Berikut kami sajikan data pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi sepanjang tahun 2020 – 2021 baik yang dilaksanakan secara luring maupun secara daring.

Tabel 4.

Data Kordinasi Internal dan Kordinasi dengan Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2021

Tahun	Tanggal	Jenis	Agenda	Sifat Luring/ Daring
		(Rapat Kordinasi/ Konsultas/ Penyerahan Laporan)		
2020	28-29 mei	Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi evaluasi penanganan pelanggaran tahap pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan serentak tahun 2020 di jawa timur. Koordinator divisi penanganan pelanggaran dan koordinator divis hukum data dan informasi 19 kabupaten/kota se jawa timur.	Daring
2020	21-Sep	Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi membedah peraturan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sidoarjo tahun 2020 panwaslu kecamatan se kabupaten sidoarjo	Daring

2020	10-Sep	Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi penanganan pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan pencalonan pada pemilihan tahun 2020 koordinator divisi penanganan pelanggaran dan koordinator divisi hukum data dan informasi 19 kabupaten/kota se Jawa timur	Daring
2021	7-Apr-21	Rapat Koordinasi	Rapat Internal Perbawaslu Pemilihan Tahun 2020	Daring
2021	20 Mei 2021	Rapat Internal	Rapat Internal (Ngopi Bareng) Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur Via Zoom mengenai Skema Tindak Lanjut Diskusi Mingguan Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur –	Daring
2021	13 – 14 Juni 2021	Rapat Internal	Rakor Internal Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur mengenai Inventarisasi Barang Dugaan Penanganan Pelanggaran	Daring

			dilaksanakan	
2021	3 Juli 2021.	Rakor Internal	Rapat Internal Penyusunan Anggaran Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur Via Zoom mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Daring
2021	11 Agustus 2021.	Rapat Internal	Rapat Lanjutan Penyusunan Anggaran Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se Jawa Timur Via Zoom mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Daring
2021	7-Sep-21	Rapat Lanjutan.	Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) mengenai Aturan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 –	Daring

BAB VI

SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI BIDANG HUKUM DAN DATA INFORMASI

I. Sosialisasi

Dalam mensosialisasikan produk hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memudahkan masyarakat untuk mengakses dokumen serta informasi yang dibutuhkan selama itu tidak termasuk informasi yang dikecualikan, masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada semua masyarakat yang membutuhkan data dan informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa produk hukum Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang di unggah, diantaranya :

Tabel 5.**Data Dokumen Hukum Dan Unggah JDIH**

No	Tahun	Jenis	Judul	Link JDIH
		(putusan / monografi / artikel / buku / penelitian / pengkajian / naskah akademis)		
1.	2021	MOU	Nomor. 018/PM.05/KJI24/12/2021 Perjanjian kerjasama dengan DEWAN PEMUDA Kab. Sidoarjo tentang Pendidikan politik hukum dan demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
2.	2021	MoU	Nomor. 017/PM.05/KJI24/06/2021 Perjanjian kerjasama dengan LP Maarif Kab. Sidoarjo tentang Pendidikan politik hukum dan demokrasi	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
3.	2021	MoU	Nomor. 016/PM.05/KJI24/05/2021 Perjanjian Kerjasama Dengan Aliansi Bem Delta Sidoarjo Tentang	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

			Pendidikan Politik Hukum Dan Demokrasi	
4.	2019	Putusan	NOMOR 01/PS.REG/16.33/I/ 2019 TAHUN 2019 TENTANG PUTUSAN PENYELESAIAN SENKETA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SIDOARJO	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/1786194997/putusan-penyelesaian-sengketa-pemilu-komisi-pemilihan-umum-kpu-kabupaten-sidoarjo.html
5.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u> <u>05/PS/BWSL.SDR.1</u> <u>6.33/IX/2018</u> <u>TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u> <u>PENYELESAIAN</u> <u>SENKETA</u> <u>PEMILU ATAS</u> <u>NAMA KOMISI</u> <u>PEMILIHAN</u> <u>UMUM (KPU)</u> <u>KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
6.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u> <u>04/PS.Reg/16.33/IX/</u> <u>2018 TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u> <u>PENYELESAIAN</u> <u>SENKETA</u> <u>PEMILU KOMISI</u> <u>PEMILIHAN</u> <u>UMUM (KPU)</u> <u>KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
7.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?

			<u>03/PS/BWSL.SDR.1</u> <u>6.33/VIII/2018</u> <u>TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u> <u>PENYELESAIAN</u> <u>SENKETA</u> <u>PEMILU KOMISI</u> <u>PEMILIHAN</u> <u>UMUM (KPU)</u> <u>KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	<u>ProdukHukumSearch%5</u> <u>Bjudul%5D=sidoarjo&p</u> <u>age=1&per-page=5</u>
8.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u> <u>01/PS/BWSL.SDR.1</u> <u>6.33/VIII/2018</u> <u>TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u> <u>PENYELESAIAN</u> <u>SENKETA</u> <u>PEMILU KOMISI</u> <u>PEMILIHAN</u> <u>UMUM (KPU)</u> <u>KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
9.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u> <u>02/PS/BWSL.SDR.1</u> <u>6.33/VIII/2018</u> <u>TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u> <u>PENYELESAIAN</u> <u>SENKETA</u> <u>PEMILU KOMISI</u> <u>PEMMILIHAN</u> <u>UMUM (KPU)</u> <u>KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5
10.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u> <u>02/LP/ADM/BWSL.</u> <u>Kab.16.33/VII/2018</u> <u>TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

			<u>PELANGARAN</u> <u>ADMINISTRASI</u> <u>PEMILU KETUA</u> <u>DAN ANGGOTA</u> <u>KOMISI</u> <u>PEMILIHAN</u> <u>UMUM (KPU)</u> <u>KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	
11.	2018	Putusan	<u>NOMOR</u> <u>01/LP/ADM/BWSL.</u> <u>Kab.16.33/VII/2018</u> <u>TAHUN 2018</u> <u>TENTANG</u> <u>PUTUSAN</u> <u>PENANGANAN</u> <u>PELANGGARAN</u> <u>ADMINISTRASI</u> <u>PEMILU KETUA</u> <u>DAN ANGGOTA</u> <u>KPU KABUPATEN</u> <u>SIDOARJO</u>	https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/index.html?ProdukHukumSearch%5Bjudul%5D=sidoarjo&page=1&per-page=5

II. Peningkatan Kapasitas Di Bidang Hukum dan Data Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk

ke dalam rumpun pemilu. Kewenangan penyelesaian sengketa pemilihan, penanganan pelanggaran pemilihan, dan penindakan pelanggaran pemilihan. Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan Dampak lanjutan pemilihan yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilihan. Selain itu, pesta demokrasi

yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan Kepala Daerah yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Peranan Bawaslu dalam menghadapi polemik Pemilu juga harus melindungi lembaga internalnya yang terjerat perkara dalam proses pelaksanaan tugas. Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan hingga jajaran Bawaslu terjerat dalam masalah hukum. kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan merupakan pekerjaan yang

berkaitan dengan praktek beracara di Pengadilan, serangkaian tindakan yang dilakukan lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya pada jajaran ad-hoc dibawahnya dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas dibidang hukum baik secara personal maupun kelembagaan.

1. Diskusi mingguan yang diselenggarakan secara daring dan luring oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, kegiatan dengan tema pemuktakhiran data pemilihan
Pemutakhiran data pemilih menjadi variabel yang sangat penting dari ketiga faktor pemilu, yaitu penyelenggara kemudian pemilih dan

yang terakhir peserta. Pemutakiran data pemilih mempunyai pengaruh terhadap tahapan yang lain dari tahapan pengadaan logistik sampai dengan tahapan kampanye dan tahapan-tahapan yang lainnya. (8/7) Sebagai bagian dari persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang, Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu se-Jawa Timur melaksanakan kegiatan Diskusi Mingguan secara daring. Diskusi yang dimulai Juni 2021 ini dilaksanakan dalam beberapa sesi dan berakhir di bulan Oktober 2021. Dalam kesempatan kali ini merupakan diskusi Mingguan ke 6 yang difasilitatori oleh Bawaslu Bojonegoro dan Bawaslu Sidoarjo dengan tema Pemutakiran Data Pemilih.

Tabel 6.

Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Yang Diikut
Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten/Kota Se-
Jawa Timur.

Tahun	Tgl	(MedSos / Tatap Muka)	Tema	Pelaksana
2021	03 Juni	daring	Penyelenggara (Antar Penyelenggara)	Bawaslu Kabupaten Bondowoso
				Bawaslu Kota Probolinggo
2021	10 Juni	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Pendaftaran Parpol)	Bawaslu Kabupaten Sampang
				Bawaslu Kota Surabaya
2021	17 Juni	daring	Penegakkan Hukum (Penanganan Pelanggaran Adm)	Bawaslu Kota Kediri
				Bawaslu Kabupaten Kediri
2021	24 Juni	daring	Teknologi Informasi (Pengawasan Media Sosial)	Bawaslu Kabupaten Blitar
				Bawaslu Kota Pasuruan
2021	01 Juli	daring	Penyelenggara (Rekrutmen)	Bawaslu Kabupaten Ngawi
				Bawaslu Kota Madiun

Tahun	Tgl	(MedSos / Tatap Muka)	Tema	Pelaksana
2021	08 Juli	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Mutarlih)	Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
				Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
2021	15 Juli	daring	Penegakkan Hukum (Penyelesaian Sengketa)	Bawaslu Kota Malang
				Bawaslu Kabupaten Bangkalan
2021	05 Agustus	daring	Teknologi Informasi (Sistem Informasi)	Bawaslu Kabupaten Malang
				Bawaslu Kota Blitar
2021	12 Agustus	daring	Penyelenggara (PolHub)	Bawaslu Kabupaten Tuban
				Bawaslu Kabupaten Lamongan
2021	19 Agustus	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Pendaftaran Peserta)	Bawaslu Kabupaten Ponorogo
				Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
2021	26 Agustus	daring	Penegakkan Hukum (Pemberian Keterangan)	Bawaslu Kabupaten Probolinggo
				Bawaslu Kabupaten Sumenep
2021	02 Sept	daring	Teknologi	Bawaslu

Tahun	Tgl	(MedSos / Tatap Muka)	Tema	Pelaksana
			Informasi (Data Informasi)	Kabupaten Pasuruan Bawaslu Kabupaten Tulungagung
2021	09 Sept	daring	Penyelenggara (SOTK)	Bawaslu Kabupaten Magetan Bawaslu Kabupaten Trenggalek
2021	16 Sept	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Kampanye)	Bawaslu Kabupaten Lumajang Bawaslu Kabupaten Situbondo
2021	23 Sept	daring	Penegakkan Hukum (Bantuan Hukum)	Bawaslu Kabupaten Jember Bawaslu Kabupaten Pamekasan
2021	30 Sept	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Logistik)	Bawaslu Kabupaten Jombang Bawaslu Kabupaten Madiun
2021	07 Okt	daring	Penyelenggara (Penegakkan Etika)	Bawaslu Kabupaten Gresik Bawaslu Kota Batu

Tahun	Tgl	(MedSos / Tatap Muka)	Tema	Pelaksana
2021	14 Okt	daring	Pengawasan Penyelenggaraan (Pungut Hitung Rekap)	Bawaslu Kabupaten Pacitan
				Bawaslu Kabupaten Nganjuk
2021	21 Okt	daring	Penegakkan Hukum (Penanganan Pidana)	Bawaslu Kabupaten Mojokerto
				Bawaslu Kota Mojokerto
2020	5 agust	Tatap muka	Bimtek 1 penyusunan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi	Bawaslu Jawa Timur
2020	20 Sept	Tatap muka	Bimtek 2 penyusunan keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi	Bawaslu Jawa Timur
2020	4 Des	Tatap Muka	Peningkatan Kapasitas bagi Seluruh Staff Hukum Bawaslu Se-jatim	Bawaslu Jawa Timur
2020	7 Des	Tatap Muka	bimbingan teknis untuk jajaran ad-hoc pengawas kelurahan/desa (PKD)	Bawaslu Kab. Sidoarjo
2020	14 Maret	Tatap Muka	Supervisi dan pemaparan materi Pada pelantikan Pengawas Desa Kelurahan	Bawaslu Kab. Sidoarjo

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bawaslu sidoarjo pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, melakukan pemantauan pelaksanaan putusan terhadap putusan Komisi Aparatur Sipil negara No.R787/KASN/3/2020, yang melibatkan salah satu aparatur sipil negara di kabupaten sidoarjo.

Tabel 7.
Data Pemantauan Putusan tahun 2020 dan 2021

Tahun	Jenis Putusan (DKPP / Pidana / Sengketa / Pelanggaran Administrasi)
2020	Pelanggaran etik Aparatur sipil Negara (Putusan Komisi Aparatur Sipil Negara No.R787/KASN/3/2020

BAB VIII

PENUTUP

I. Kesimpulan

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Sidoarjo dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo selama menghadapi Pemilu agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai

upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, Bantuan Hukum, pemberian keterangan terhadap Sengketa Hasil Pemilu, tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan informasi yang mudah didapati oleh masyarakat dan pemberian keterangan pada Sengketa Hasil Pemilihan Umum telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten Bintan pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* pemilu.

II. Saran

Dalam rangka mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas, mutlak

diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mempermanenkan strukturnya yang sudah patut dipermanenkan, mengingat pelaksanaan pemilu secara nasional yang mencakup hingga desa/kelurahan membutuhkan kemandirian dan persiapan matang yang bersumber dari dukungan organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel yang permanen. Selain itu, Bawaslu juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan

pemilihan bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

Rekomendasi dan saran terkait perkembangan website. Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan mutu SDM pengelola website dengan memberikan pelatihan/sertifikasi dibidang pengelolaan website bagi petugas pengelola website Se-Provinsi Jawa Timur. Sehingga, target keterbukaan informasi melalui media website dapat lebih mudah dicapai.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berpandangan bahwa aspek optimalisasi website lembaga publik khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur dapat dirincikan lebih detail melalui beberapa pendekatan yakni :

- Target peningkatan pengunjung situs;
- Informasi publik yang wajib tersedia

berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;

- *Page Rank* yang tinggi dan akses yang mudah dengan berbagai penggunaan tools SEO;
- *Mobile friendly* dan interface yang menarik;
- Mendapatkan feedback dan widget interaktif;
- Berita yang wajib di update setiap hari;

Sehingga, optimalisasi website resmi Lembaga publik dapat terpenuhi sekaligus terpercaya dalam hal menyajikan informasi yang relevan. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memberikan masukan dan saran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia untuk menyewa sebuah privat server yang dapat digunakan sebagai management file sharing di setiap user pengawas Pemilu adhoc

Se-Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan sebagai alat kerja pengawasan sekaligus laporan hasil pengawasan (*Formulir model A*) yang bersifat online dan dapat di arsip dengan mudah. Sehingga data terpusat dan dapat mudah diakses sampai ketingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Kebutuhannya cukup mendesak, dikarenakan pengalaman kami pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah mengalami kegagalan pada akses penggunaan siwaslu. Kemudian standar alat kerja pengawasan di setiap tahapan sering mengalami keterlambatan.

Pengalaman Pemilu tahun 2019 yang baru saja kita awasi, seringkali kita menunggu dan meminta laporan hasil pengawasan dari jajaran dibawah. Mulai dari PTPS ke PKD, dari PKD ke panwascam, dari panwascam ke Bawaslu Kab/Kota dan dari Bawaslu Kab/ Kota ke Provinsi. Tekanan

selalu dihadapkan pada pimpinan / kordiv disetiap tingkatan perihal LHP. Hal ini yang telah kita rasakan bersama. Namun kami berharap, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat memulai terlebih dahulu sebelum dimulai pada skala Nasional. Laporan Online berbasis sistem management file sharing dapat meningkatkan akurasi hasil pengawasan yang dilakukan jajaran pengawas dibawah, sekaligus dapat melakukan tindakan cepat jika terdapat pelanggaran dan atau bukan pelanggaran pada laporan hasil pengawasan di jajaran tingkat bawah. Hal ini dikarenakan pimpinan / kordiv ditingkat atas dapat memantau secara real time atas kegiatan pengawasan yang dilakukan ditingkat bawahnya secara bersamaan dan menyeluruh. Sehingga harapannya, bahwa situs Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hanya sebatas keterbukaan informasi dengan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi), namun juga dapat dikembangkan dengan manajemen mutu disetiap kerja pengawasan dengan mendesain PTIK (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) ditingkat Provinsi.

